

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sector minyak dan gas yang menjadi tumpuan utama pemerintah pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an tidak bisa lagi menjadi pemain penting dalam pendapatan Negara seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan sifat dari minyak dan gas yang tidak bisa diperbaharui. Pemerintah pun mencari alternative lain yang dinilai lebih aman, yaitu pajak. Pajak terbukti memegang jajaran peran utama dalam pembangunan nasional yang berhilir pada kesejahteraan rakyat karena menduduki 70% hingga 80% dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi pekerjaan rumah yang vital bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Jika pajak diklasifikasikan menurut pemungut dan pengelola, dapat kita temui dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Instansi yang terlibat disini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja. Pajak Kendaraan

Bermotor memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak sehingga sangat penting untuk dioptimalkan dengan cara meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak (WP).

Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita abaikan dalam pembahasan ini. Mardiasmo (2016:7) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai apapun yang diketahui dan dipahami dari hukum pajak materiil dan pajak formil. Pengetahuan yang mumpuni akan pajak akan meminimalisir timbulnya *tax evasion*. Pernyataan pendukung atas hal ini juga terdapat dalam Paramartha dan Rasmini (2016) bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas pelayanan fiskus dari Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi faktor kunci selanjutnya. Dalam teori atribusi dijabarkan bahwa komponen luar yang memiliki pengaruh pada persepsi Wajib Pajak adalah kualitas dari pelayanan. Pelayanan yang berkualitas terbukti berpengaruh positif pada level patuh untuk membayar pajak. Tentu ini dipicu oleh rasa senang karena terlayani dengan baik. Paramartha dan Rasmini (2016) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi secara positif oleh kualitas dari layanan.

Kesadaran turut memiliki peran penting. Kesadaran Wajib Pajak berarti situasi tau, sanggup, dan mau mengerjakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Komponen dari kesadaran Wajib Pajak sendiri adalah persepsi positif akan pajak dan peningkatan pengetahuan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran rendah cenderung abai dan melanggar peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan satu

fenomena dimana masyarakat yang abai mengandalkan kebijakan pemutihan denda. Hal ini tentu mendegradasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Penelitian Megawangi dan Setiawan (2017) mendukung pernyataan ini, bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dipengaruhi komponen kesadaran Wajib Pajak.

Pemerintah mengandalkan langkah sosialisasi untuk mengatasi hal ini. Terobosan sosialisasi yang dilakukan adalah iklan digital di berbagai media social dalam berbagai format yang interaktif. Model sosialisasi ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk paham akan faedah pajak terlebih sanksi bagi yang melanggar.

Fenomena penghindaran pajak tersebut menjadi sinyal bahwa ada faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak yang tidak berjalan sehingga memilih abai pada kewajibannya. Sinyal ini dapat dijadikan prioritas kajian guna optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Terlebih, pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai pajak namun masih saja banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Fenomena yang terjadi di Kota Batam, puluhan kendaraan ditahan oleh instansi yang berwenang tiap razia digelar karena terbukti memiliki pajak terutang bahkan hingga beberapa tahun.

Berdasarkan penjabaran akan pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor dan penggambaran fenomena mengenai pajak tersebut di Kota Batam, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Dinas Pendapatan Kota Batam”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi terjadinya penurunan penerimaan pajak selama Covid-19 pada Dinas Pendapatan Kota Batam.
2. Mengetahui jumlah dan pemasukan target kendaraan bermotor tahun sebelum pandemi dan selama pandemi periode Januari-Desember 2020 karena selama pandemi ini banyak masyarakat yang menunggak tidak membayar pajak kendaraan nya dengan berbagai faktor.
3. Langkah dan strategi yang diambil pemerintah untuk mencapai target realisasi pajak kendaraan bermotor yang belum efektif dilakukan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan dalam kepatuhan perpajakan ini maka peneliti akan memberikan batasan agar tidak menyimpang memberikan informasi serta dapat dimengerti dan dipahami untuk peneliti selanjutnya.

1. Faktor-faktor kepatuhan kendaraan bermotor.
2. Realisasi penerimaan pajak dari sebelum pandemi hingga saat ini.
3. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang , identifikasi masalah , dan batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana Realisasi penerimaan pajak kendaraan pajak bermotor sebelum dan selama covid-19 ?
3. Bagaimana Strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target perpajakan kendaraan bermotor ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid-19 karena dimasa pandemi ini banyak para pengendara yang menunggak dalam pembayaran pajak. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target perpajakan kendaraan bermotor pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga bahan pertimbangan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang dan objek yang sama.

### **1.6.2 Manfaat Praktis.**

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengimplementasikan kemampuan dan ilmu yang di dapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
2. Bagi pemerintah dapat memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta dapat digunakan untuk memberi masukan kepada Dispenda Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.